

[SIARAN PERS]

Nomor:13 /RILIS/BKN/VII/2018

35 Instansi Pemerintah Pengelola Kepegawaian Terbaik Terima Anugerah BKN Award 2018

Sebanyak 35 instansi pemerintah pengelola kepegawaian terbaik ditetapkan sebagai penerima BKN Award Tahun 2018. Penganugerahan BKN Award dilakukan oleh Kepala BKN Bima Haria Wibisana dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian Tahun 2018 di Gedung *Indonesia Convention Exhibition (ICE)* BSD Tangerang, Rabu 11 Juli 2018. Dalam perhelatan Rakornas kepegawaian yang telah digelar kali keempat ini, BKN Award diberikan kepada Instansi Pengelola Kepegawaian terbaik sepanjang tahun 2017. BKN Award merupakan upaya BKN dalam memberikan motivasi untuk instansi dalam mengelola kepegawaian Aparatur Sipil Negara terbaik.

Ketetapan instansi pemerintah pemenang BKN Award 2018 tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 68/KEP/2018 tentang Nama-Nama Instansi Pemerintah Pemenang BKN Award Tahun 2018 tertanggal 22 Juni 2018. Keputusan penetapan pemenang tersebut ditetapkan berdasarkan hasil penilaian terhadap seluruh instansi pemerintah pusat maupun daerah berdasarkan 7 (tujuh) kriteria yang sudah ditentukan.

Instansi pemerintah pemenang BKN Award 2018 dibagi ke dalam 7 (tujuh) kategori. Ketujuh Kategori tersebut meliputi: 1) Kementerian Kategori Besar, 2) Kementerian Kategori Kecil, 3) Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), 4) Provinsi, 5) Kabupaten/Kota Tipe A (beban kerja yang besar), 6) Kabupaten/Kota Tipe B (beban kerja yang sedang), dan Kabupaten/Kota Tipe C (beban kerja yang kecil). Selanjutnya dalam setiap kategori tersebut terdapat 5 (lima) pemenang (terlampir).

Instansi pemenang BKN Award 2018 tersebut ditetapkan berdasarkan 7 (tujuh) kriteria. Ketujuh kriteria penilaian BKN Award 2018 tersebut meliputi: BKN telah menetapkan 7 (tujuh)

kriteria instansi pemerintah yang laik untuk menerima BKN *Award* 2018 ini. Ketujuh kriteria penilaian BKN *Award* 2018 tersebut meliputi: 1) Perencanaan Formasi; 2) Pelayanan Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun; 3) Implementasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK); 4) Pemanfaatan *Computer Assisted Test* (CAT-BKN); 5) Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN); 6) Implementasi Penilaian Kinerja; dan 7) Komitmen Pengawasan dan Pengendalian.

Ketujuh kriteria penilaian tersebut secara lebih rinci dijabarkan dalam 22 (dua puluh dua) poin sebagai berikut:

Kriteria pertama, Perencanaan Formasi, meliputi: 1) Instansi mempunyai peta jabatan dan rencana Kebutuhan Pegawai untuk 5 tahun yang disusun berdasarkan Anjab dan ABK untuk seluruh pegawai, 2) Instansi menerapkan sistem aplikasi untuk analisis kebutuhan pegawai untuk seluruh jabatan yang dikelola secara berkala untuk seluruh jabatan, dan 3) Instansi mengajukan rencana formasi dengan kelengkapan data terkini terkait dengan rasio anggaran belanja pegawai, rasio alokasi Batas Usia Pensiun (BUP) secara lengkap untuk seluruh jabatan.

Kriteria kedua, Pelayanan Pengadaan, mencakup: 1) Instansi memiliki komitmen akan ketepatan waktu Penyampaian data usul pengadaan dan kelengkapan berkas usulan, dan 2) Instansi memiliki komitmen untuk menyelesaikan masalah terkait dengan Berkas Tidak Lengkap (BTL).

Kriteria ketiga, Implementasi SAPK, terdiri atas: 1) Rutinitas Instansi melakukan up-date dan validasi data secara berkala, 2) Transaksi data melalui SAPK terintegrasi dengan aplikasi kepegawaian instansi terkait, 3) Percepatan processing data terkait dengan pelayanan kepegawaian (Kenaikan Pangkat, Pengadaan, Mutasi, dan Pensiun), 4) Ketersediaan infrastruktur penunjang penyelenggaraan SAPK, dan 5) Ketersediaan SDM penyelenggara SAPK yang kompeten.

Kriteria keempat, Pemanfaatan CAT-BKN, meliputi: Instansi memanfaatkan CAT-BKN dalam berbagai kegiatan manajemen kepegawaian terkait dengan seleksi, pemetaan, diklat, ikatan dinas, dll sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Kriteria kelima, Penilaian Kompetensi ASN, terdiri atas: 1) Ketersediaan Unit penyelenggara kegiatan penilaian kompetensi, 2) Pemanfaatan kegiatan penilaian kompetensi, dan 3) Tingkat kepatuhan instansi terhadap hasil dari penilaian kompetensi.

Kriteria keenam, Implementasi Penilaian Kinerja: 1) Instansi telah melaksanakan penjabaran kegiatan tugas jabatan (target kinerja) yang dibagi habis dari tingkat jabatan tertinggi sampai dengan tingkat jabatan yang terendah secara hirarki, 2) Instansi telah melaksanakan pengukuran kinerja organisasi terkait dengan indeks kepuasan masyarakat (IKM), 3) Instansi telah membentuk Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai Peraturan Perundang-undangan, 4) Instansi telah memanfaatkan penilaian kinerja untuk pembinaan PNS, 5) Instansi telah melaksanakan kepatuhan pelaporan Penilaian kinerja PNS (e-Lapkin), dan 6) Instansi telah menggunakan aplikasi e-kinerja yang terintegrasi dengan sistem aplikasi lainnya.

Kriteria ketujuh, Komitmen Pengawasan dan Pengendalian, mencakup: 1) Instansi memiliki kepatuhan terhadap norma, standar, prosedur dan kriteria manajemen ASN, dan 2) Instansi memiliki komitmen melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin dan/atau pemberhentian terhadap PNS yang melakukan kejahatan jabatan.

Daftar 35 Instansi Pemerintah Pemenang BKN Award 2018

	Kategori	Pemenang
I	Kementerian Kategori Besar	<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Keuangan - Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat - Kementerian Perhubungan - Kementerian Hukum dan HAM - Kementerian Kesehatan
II	Kemeterian Kategori Kecil	<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Kementerian Luar Negeri - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan - Kementerian Badabn Usaha Milik Negara - Kementerian Sekretariat Negara
III	Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)	<ul style="list-style-type: none"> - Lembaga Administrasi Negara - Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan - Kepolisian Negara - Badan Pusat Statistik - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
IV	Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> - Provinsi Jawa Timur - Provinsi Sulawesi Utara - Provinsi Bali - Provinsi Riau - Provinsi Jawa Barat



BKN

Badan Kepegawaian Negara

Jl. Mayjend Sutoyo No. 12 Jakarta Timur 13640 Telp 021-80882815, Fax. 021-80882815

Web: www.bkn.go.id Email: humas@bkn.go.id Twitter: @BKNgoid Facebook: BKNgoid Instagram: @BKNgoidofficial

V	Kabupaten/Kota Tipe A	<ul style="list-style-type: none">- Kabupaten Banyuwangi- Kota Yogyakarta- Kota Balikpapan- Kota Tangerang- Kota Sorong
VI	Kabupaten/Kota Tipe B	<ul style="list-style-type: none">- Kabupaten Sleman- Kabupaten Pohuwato- Kabupaten Gayo Lues- Kabupaten Mimika- Kabupaten Muaraenim
VII	Kabupaten/Kota Tipe C	<ul style="list-style-type: none">- Kabupaten Sumba Tengah- Kota Surakarta- Kabupaten Bantaeng- Kabupaten Pringsewu- Kabupaten Pakpak Bharat

Jakarta, 11 Juli 2018
Kepala Biro Humas BKN

ttd

Mohammad Ridwan